

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

Muhammad Ilham Fauzy
NPP. 29.0680

*Asdaf Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : muhammadilham.fauzyy@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The problem with this research is the high number of community violations during the implementation of community activity restrictions (PPKM) in Purwakarta Regency. The formulation of the problem in this study is how the role of the Civil Service Police Unit is in implementing restrictions on community activities in Purwakarta Regency, West Java Province, the role factors of the Civil Service Police Unit in implementing restrictions on community activities in Purwakarta Regency, West Java Province and what efforts are being made to optimize the role of the Civil Service Police. The Civil Service Police Unit in the implementation of restrictions on community activities in Purwakarta Regency, West Java Province.* **Purpose:** *The purpose of this study is to analyze and describe the role of the Civil Service Police Unit in implementing restrictions on community activities in Purwakarta Regency, West Java Province.* **Methods:** *The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. In collecting data, the writer uses observation, interview and documentation techniques. The theory used in this research is the role theory by Sukanto (2012). In this theory there are 2 (two) dimensions, namely regarding rights and obligations.* **Result:** *The Purwakarta Regency Civil Service Police Unit in implementing the implementation of community activity restrictions (PPKM) can run well and optimally even though there are several obstacles.* **Conclusion:** *Based on the results of research on the role of the Civil Service Police Unit in implementing restrictions on community activities in Purwakarta Regency, West Java Province, it has played a very good and optimal role. However, there are several obstacles that must be overcome such as low work ability, lack of employee initiative, lack of facilities and infrastructure, and lack of budget availability. However, efforts have been made to overcome these obstacles so that the role of the Civil Service Police Unit in implementing restrictions on community activities in Purwakarta Regency, West Java Province can run optimally.*

Keywords: *Role, PPKM, Activity Restriction*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Permasalahan dari penelitian ini adalah tingginya jumlah pelanggaran masyarakat saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Purwakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, faktor peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengoptimalkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peranan oleh Sukanto (2012). Dalam teori ini terdapat 2 (dua) dimensi yaitu mengenai hak dan kewajiban. **Hasil:** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dapat berjalan dengan baik dan optimal meskipun terdapat beberapa kendala. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sudah berperan dengan sangat baik dan optimal. Namun terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi seperti kemampuan kerja yang rendah, kurangnya inisiatif pegawai, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya ketersediaan anggaran. Akan tetapi hambatan tersebut telah diupayakan agar segera diatasi sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Peranan, PPKM, Pembatasan Kegiatan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi *Coronavirus Disease of 2019* (COVID-19) menjadi keresahan seluruh dunia termasuk di Indonesia. Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrom Corona Virus 2* (scars-CoV-2) merupakan sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia bahkan dapat menyebabkan kematian. COVID-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga masih banyak pihak yang belum tahu bagaimana cara penanggulangan virus tersebut (Telaumbanua, 2020). Pandemi COVID-19 memberi dampak bagi beberapa sektor di Indonesia, hal ini tentunya mengharuskan pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, melalui aturan tersebut dijelaskan bahwa penanggulangan bencana nasional akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-19. Kemudian dalam Keppres tersebut juga berisi kepala daerah menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah. Tentu saja penetapan kebijakan daerah juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat (Pramana, 2021).

Dalam upaya menangani lonjakan COVID-19, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran Gubernur dan Bupati/Wali Kota Nomor 440/5184/SJ yang mengintruksikan kepada setiap kepala daerah untuk membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di tingkat daerah baik di tingkat provinsi maupun lingkup kabupaten/kota serta kepala daerah menjadi ketua Satgas dan tidak dapat di delegasikan pada pejabat lainnya. Dengan adanya surat edaran ini diharapkan pemerintah daerah lebih sigap dalam menangani kasus lonjakan COVID-19 di masing-masing daerahnya.

Salah satu provinsi di Indonesia dengan lonjakan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia adalah provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana menjadi salah satu provinsi yang menerapkan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 yang pada dasarnya memberikan pedoman bagi pemerintah Kota dan Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Barat (Herdiana, 2020).

Berdasarkan substansi dalam Keputusan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa harus adanya komitmen dan keterlibatan yang baik antara pemerintah daerah seperti Gubernur, Bupati atau wali kota dengan unsur TNI, Kepolisian, dan Satpol PP (Herdiana, 2020). Contoh daerah yang rawan COVID-19 adalah Provinsi Jawa Barat bahkan persebarannya sudah merata disetiap kabupaten atau kota di provinsi Jawa Barat. Salah satu kabupaten yang rawan dan terdampak adalah Kabupaten Purwakarta. Pada bulan Juni 2021 terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Purwakarta, oleh karena itu harus adanya tindakan penanganan yang ketat untuk menurunkan angka persebaran COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. Beberapa cara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah dengan memperkuat penanganan bersama gugus tugas, TNI, Polri dan Satpol PP (jabarprov.go.id, 2021).

Dengan adanya Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 433 kep.458-Huk/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Purwakarta maka penertiban masyarakat di masa PPKM harus diperketat sesuai dengan arahan langsung dari pemerintah pusat (jabarprov.go.id, 2021). Sehingga salah satu peranan dari perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenraman masyarakat, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat diperlukan.

Pendekatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Purwakarta dengan petugas gabungan kepada masyarakat seperti melalui sosialisasi, himbauan dan penertiban yang diharapkan dapat menurunkan kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Purwakarta (PPID Kabupaten Purwakarta, 2021). Walaupun beberapa upaya sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 saat PPKM bersama Satpol PP dan petugas gabungan lainnya, masih ditemukan tingginya jumlah pelanggaran yang dilakukan masyarakat (Handayani & Kurniawan, 2021).

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban masyarakat pada PPKM di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat menarik untuk diteliti, karena peranan dari Satpol PP memiliki pengaruh besar pada pemerintah daerah terutama dalam upaya penertiban di masa PPKM untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil judul penelitian yaitu : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang diambil

Ada beberapa permasalahan terkait peranan Satpol PP dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satunya ialah tingginya pelanggaran masyarakat Kabupaten Purwakarta dalam menjaga protokol kesehatan. Cukup banyak masyarakat yang terkena sanksi dalam masa PPKM baik sanksi perorangan maupun sanksi pelaku usaha.

Tabel 1.

Laporan Kegiatan Penegakan Hukum Proses Untuk Pengendalian Penyebaran *Covid-19* Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Bulan Juli hingga September 2021

Tanggal Pelanggaran	Sanksi Perorangan	Sanksi Pelaku Usaha
1-8 Juli 2021	37	23
9-16 Juli 2021	314	112
17-24 Juli 2021	202	78
25-31 Juli 2021	387	26
1-8 Agustus 2021	420	6
9-16 Agustus 2021	515	17
17-24 Agustus 2021	845	8
25-31 Agustus 2021	680	11
1-8 September 2021	754	14
9-16 September 2021	755	10
Jumlah pelanggaran	4.909	305

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, 2022

Berdasarkan **Tabel 1.** laporan kegiatan penegakan hukum proses untuk pengendalian penyebaran Covid-19 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta ada 4.909 orang yang melanggar dan 305 pelaku usaha yang melanggar dari bulan Juli hingga September 2021. Laporan tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan ataupun bersikeras dalam mengabaikan protokol kesehatan untuk memenuhi kegiatan perekonomian.

Kurangnya peranan Satpol PP dalam pelaksanaan PPKM juga menjadi salah satu permasalahannya. Kinerja Satpol PP dalam penerapan PPKM kurang optimal dalam mencegah masyarakat untuk melanggar protokol kesehatan. Hal tersebut terjadi akibat dari kurangnya anggaran serta sarana prasarana yang tersedia.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian ini terinspirasi oleh beberapa peneliti terdahulu baik dalam konteks strategi Satuan Polisi Pamong Praja maupun Konteks peranan Satuan Polisi Pamong Praja. Firmanda dan Adnan berjudul *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang* (Firmanda dan Adnan, 2021), menggunakan metode penelitian kualitatif. hasilnya menemukan bahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Satpol PP sudah cukup baik, walaupun ada kebijakan Satpol PP yang masih di langgar oleh PKL.

Kedua, penelitian dari Handayani dan Kurniawan yang berjudul *The Effectiveness of the Law Enforcement of Health Protocols in Efforts To Prevent and Control Covid-19 By Satpol PP, Bandung City* (Handayani dan Kurniawan, 2021) menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasilnya menyatakan bahwa protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung sudah sesuai dengan fungsinya. Namun masih ada masyarakat yang belum sadar menerapkan protokol kesehatan.

Ketiga, penelitian dari Muhammad Irijik Ibnu Hakim yang berjudul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 Pada*

Masyarakat Kabupaten Jember (Muhammad Irjik Ibnu Hakim, 2020) menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan penegakan peraturan sudah maksimal namun masih banyak masyarakat yang tidak peduli dalam penerapan protokol kesehatan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori dari Soerjono Soekanto (Soekanto, 2012) yang menyatakan bahwa ketika Ketika seseorang menjalankan peranan, maka ia akan melaksanakan hak dan kewajibannya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana, faktor penghambat apa saja dan upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:15) Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisa data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2017:308) mengemukakan teknik pengumpulan data adalah tahap penting dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya teknik pengumpulan data maka peneliti akan kesulitan memperoleh data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Model Miles & Huberman dalam Sugiyono (2020:321-330), yakni Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), *Data Display* (Penyajian Data) dan Menarik Kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat

Penulis menganalisis bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan Teori peranan dari Soerjono Soekanto (2012). Dimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam PPKM di Kabupaten Purwakarta dengan hasil sebagai berikut :

- A. Dimensi Hak yang didapatkan cukup baik. Dari 3 indikator yang ada yaitu, hanya 1 indikator yang kekurangan yaitu indikator anggaran. Hal ini disebabkan dikarenakan adanya pandemic *Covid-19* yang berakibat pada *recofusing* dan relokasi anggaran sehingga anggaran yang diterima lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya padahal Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garda terdepan dalam mencegah penyebaran pandemic *Covid-19*. Adapun indikator mengenai kepegawaian dan sarana prasarana

yang tersedia untuk menunjang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) cukup memadai.

- B. Dimensi Kewajiban yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Mulai dari indikator tupoksi, program kegiatan, visi misi, dan koordinasi semua berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena dalam masa pandemi *Covid-19*, Satpol PP lebih memfokuskan segala program dan kegiatan dalam melaksanakan PPKM sehingga angka penyebaran *Covid-19* dapat diturunkan. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

3.2. Faktor Penghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat

Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak selalu sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kendala ataupun hambatan akan selalu ada dalam setiap pelaksanaan. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat terdapat kendala dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Kemampuan Kerja yang Rendah

Rata-rata pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta memiliki tingkat pendidikan SLTA bahkan ada juga yang mempunyai pendidikan di tingkat SLTP dan SD. Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta juga sebagian belum melaksanakan pelatihan teknis yang menunjang pelaksanaan tupoksinya. Kondisi inilah yang dapat menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

2. Kurangnya Inisiatif Pegawai

Kurangnya inisiatif pegawai merupakan salah satu penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sebagian besar aparat Satpol PP selalu menunggu perintah padahal jika sudah dilapangan Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengambil keputusan secara bijaksana agar tidak merugikan berbagai pihak.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih kurang memadai. Hal itu dapat dilihat dari fasilitas dalam pelaksanaan PPKM seperti Alat Pelindung Diri (APD) bagi anggota Satpol PP Kabupaten Purwakarta yang turun ke lapangan masih kurang. Satpol PP Kabupaten Purwakarta yang turun ke lapangan hanya dilengkapi oleh masker padahal harus tersedia juga *hand sanitizer* serta muliti vitamin dalam menunjang kegiatan PPKM karena Satpol PP Kabupaten Purwakarta berhadapan langsung dengan masyarakat.

4. Ketersediaan Anggaran yang Kurang

Anggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta mengalami kekurangan karena ketidak sebandingan anggaran dan pengeluaran pelaksanaan kegiatan terutama dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang memakai banyak anggaran.

3.3. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat

1. Peningkatan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Peningkatan kemampuan aparat Satpol PP dilakukan dengan mengikuti pendidikan maupun pelatihan. Sehingga pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan sebagai penunjang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

2. Pembinaan kepada Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Setelah pelaksanaan kegiatan di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta selalu melakukan evaluasi dalam bentuk pembinaan. Pembinaan bagi aparat Satpol PP dilakukan sehingga mempunyai inisiatif tinggi dan lebih bersikap humanis kepada masyarakat dalam bekerja. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya aparat Satpol PP Kabupaten Purwakarta dapat memahami tugas, tanggung jawabnya dan tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dapat tercapai dengan efektif dan efisien serta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

3. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta yang memadai

Pengadaan fasilitas bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta selalu diadakan setiap tahunnya. Perbaikan maupun pembaharuan juga dilakukan terhadap sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta yang tersedia. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada kendala.

4. Memaksimalkan anggaran yang tersedia

Kekurangan anggaran bukan hanya terjadi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta tetapi Dinas dan OPD lainnya juga mengalami hal yang sama. Adapun anggaran tersebut digunakan sebagai pemulihan pandemi *covid-19*. Walaupun demikian, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta berusaha memaksimalkan anggaran yang ada terutama dalam pelaksanaan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga penyebaran pandemi *covid-19* di Kabupaten Purwakarta dapat ditekan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat telah berjalan dengan baik walaupun ada berbagai faktor penghambat. Satuan Polisi Pamong Praja memegang peranan penting dalam menekan angka penyebaran Pandemi *Covid-19*.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Bara telah memberikan banyak dampak positif terbukti dengan adanya penurunan angka penyebaran pandemic *covid-19* sehingga pelaksanaan PPKM berangsur-angsur mengalami penurunan ke level 1. Walaupun masih ada masyarakat yang melanggar, layaknya temuan Handayani dan Kurniawan (Handayani dan Kurniawan, 2021) Penulis menemukan temuan penting yaitu peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dari dimensi hak cukup terpenuhi walaupun adanya kekurangan pada indikator anggaran karena adanya relokasi anggaran akibat dari pandemic *covid-19*. Namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja berusaha dengan baik untuk mengoptimalkan anggaran yang ada. Dimensi Kewajiban yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Mulai dari indikator tupoksi, program kegiatan, visi misi, dan koordinasi semua berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena dalam masa pandemi *Covid-19*, Satpol PP lebih memfokuskan segala program dan kegiatan dalam melaksanakan PPKM sehingga angka penyebaran *Covid-19* dapat diturunkan. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

Adanya peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta diharapkan terus dilakukan, sehingga penyebaran pandemi *covid-19* dapat di cegah dan masyarakat dapat kembali beraktifitas seperti biasanya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sudah berjalan dengan optimal, dikarenakan adanya program serta kerja sama yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya angka penyebaran *covid-19* serta penurunan *level* PPKM yang tadinya dari *level* 5 secara bertahap turun menjadi *level* 1.
2. Faktor penghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta adalah kemampuan kerja yang rendah, kurangnya inisiatif pegawai, kurangnya sarana dan prasarana ketersediaan anggaran yang kurang.
3. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta adalah peningkatan kemampuan dan pembinaan bagi aparat Satpol PP Kabupaten Purwakarta, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, memaksimalkan anggaran yang tersedia.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang dirasa tidak cukup.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis berharap kedepannya ini merupakan bahan ketika melanjutkan penelitian ke jenjang yang lebih tinggi sebagai dasar untuk lebih mendalami penelitian yang dilakukan pada lokasi serupa berkaitan dengan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Firmanda, R., & Adnan, M. F. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3).
- Hakim, M. I. I. (2020). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember)*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Handayani, T. A., & Kurniawan, W. (2021). The Effectiveness of the Law Enforcement of Health Protocols in Efforts To Prevent and Control Covid-19 By Satpol Pp, Bandung City. *International Journal of Latin Notary*, 1(2).
- Herdiana, D. (2020). Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi

Kebiasaan Baru (AKB) di Provinsi Jawa Barat. *Journal of Governance Innovation*, 2(2), 131–156.

Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

———. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.



